

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Purba, 2023).

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi yang di mana pihak prinsipal berharap pihak agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam lingkup pemerintahan, pemerintah pusat memiliki peran sebagai prinsipal atau entitas yang memberikan wewenang, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai agen atau pelaksana tugas dan wewenang. Dalam konsep desentralisasi, pemerintah pusat melimpahkan kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur segala aktivitas pemerintahannya sendiri, tetapi pemerintah pusat tidak serta-merta lepas tangan. Salah satu contoh pemerintah pusat masih memiliki campur tangan terhadap kegiatan daerah adalah dengan memberi dana perimbangan dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan daerah dan memungkinkan daerah tersebut menjadi mandiri secara finansial. Dengan tujuan

tersebut, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang (Sulistyawati et al, 2024).

Dengan gagasan mendasar bahwa agen adalah pihak yang memperoleh kekuasaan dan pemberi hibah adalah pihak yang memberikan kekuasaan, teori keagenan berpusat pada interaksi antara dua pihak. Penelitian ini menggambarkan teori keagenan dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara prinsipal dan agen sebanding dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori keagenan Jensen & Meckling (1976) menggambarkan hubungan kontraktual antara pihak yang memberikan kepercayaan (prinsipal) dengan pihak yang diberikan kepercayaan (agen). Dalam hal ini, pemerintah pusat adalah prinsipal yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agen. Teori agensi menekankan pentingnya pengawasan dan pengelolaan yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan mendorong kemandirian daerah. Daerah otonom perlu memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menjalankan pemerintahan, sementara kemandirian daerah tercermin dari berkurangnya ketergantungan finansial pada pemerintah pusat, Dalam teori agensi, kemandirian ini berfungsi sebagai insentif bagi pemerintah daerah untuk bertindak lebih efisien dalam mengelola keuangan dan sumber daya daerah, karena semakin tinggi kemandirian daerah, semakin besar fleksibilitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan (Hasyim et al, 2024).

2.1.2 Upaya Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2019) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang, yang memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang untuk membayar kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan, yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong dan penghambat) untuk mencapai tujuan dibidang keuangan (Simbolon & Herijawati, 2023).

Mardiasmo (2018:14) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah dan rakyatnya.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan pajak daerah adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang baik pribadi maupun badan bersifat memaksa berdasarkan undang undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah.

2.1.2.2 Jenis Pajak dan Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Alat Berat
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - e. Pajak Air Permukaan
 - f. Pajak Rokok
 - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
 - d. Pajak Reklame

- e. Pajak Air Tanah
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB
- i. Opsen BBNKB.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.1.2.3 Pengertian Upaya Pajak

Tax effort atau upaya pajak mengindikasikan perbandingan perolehan pajak dengan besar kemampuan untuk membayar pajak pada daerah tertentu. Perolehan pajak dilihat dari realisasi besar pajak daerah pada realisasi APBD (Asmawanti et al., 2016). *Tax effort* (upaya pajak) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menambah penerimaan pajak daerah. *Tax effort* juga merupakan perbandingan antara rasio penerimaan pajak dengan potensi bayar pajak di suatu daerah (Fadhli et al., 2023).

Tax effort merupakan salah satu wujud dari bagaimana kemampuan suatu daerah dalam memungut dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya, upaya pajak suatu daerah seringkali dilihat berdasarkan penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu periode tertentu (Amoh, 2019). PDRB sebagai *value* dari kemampuan bayar pajaknya. Jika PDRB suatu daerah tinggi,

maka dapat dinyatakan tingginya kemampuan dalam membayar pajak (Oktavia & Handayani, 2021).

Upaya pajak adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan pajak dengan potensi pajak. jika nilai *tax effort* mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan posisi fiskal di daerah tergolong kuat, sedangkan jika nilai *Tax effort* mendekati 0 (nol) maka posisi fiskal di daerah tergolong lemah. Semakin besar nilai tersebut maka menunjukkan semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak (Solihat & Lubis, 2024).

Dari definisi tersebut maka upaya pajak atau *Tax effort* dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak daerah sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah melalui indikator perbandingan penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto.

2.1.2.4 Pengukuran Upaya Pajak

Berdasarkan definisinya, *Tax effort* dapat digunakan untuk menganalisis posisi fiskal suatu daerah yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap kapasitas pajak. Suatu wilayah dianggap memiliki *Tax effort* yang tinggi jika nilai rasionya lebih besar dari 1. Hal ini menyiratkan wilayah tersebut dapat memanfaatkan atau menggali seluruh basis pajaknya untuk meningkatkan penerimaan. Di sisi lain, nilai rasio *Tax effort* yang kurang dari 1 mengindikasikan masih terdapat potensi untuk digali sebagai penerimaan pajak di wilayah tersebut

(Kristiaji et al., 2021). Secara matematis, *Tax effort* dapat ditunjukkan dengan persamaan berikut:

$$\text{Upaya Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}}$$

Menurut Lailia et.all (2016) pengukuran *Tax effort* dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan kemampuan membayar pajaknya yang direpresentasikan oleh PDRB. *Tax effort* adalah adalah perbandingan antara penerimaan realisasi pajak berkenaan dengan kesanggupan bayar pajak disuatu daerah (PDRB). *Tax effort* Dinyatakan dalam bentuk persentase. Kesanggupan membayar pajak suatu daerah lazimnya dihitung menggunakan nilai suatu produk domestik regional bruto (PDRB). Analisis *Tax effort* bisa dipakai untuk mendeteksi bagaimana kedudukan fiskal disuatu daerah menggunakan *range* nilai *Tax effort* antara 0 sampai 1 (Arief , 2020).

Berdasarkan pengertian tersebut rumus untuk pengukuran upaya pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Upaya Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2017) Mengemukakan pendapat mengenai Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan merupakan ukuran perubahan aktivitas ekonomi yang terjadi setiap tahun. Pengukurannya dengan membandingkan pendapatan nasional antara tahun-tahun yang berbeda.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil dari kinerja pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi. Pertumbuhan ekonomi direpresentasikan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi, di mana peningkatan pembangunan ekonomi di daerah akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Jannah et al., 2022).

Menurut Kementerian Keuangan (2018), mendefinisikan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahalizikri Fakhruddin et al., (2022) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah angka yang menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara dalam satu tahun jika dilihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Dalam penelitiannya Holung et al., (2021) Mempertegas bahwa Pertumbuhan Ekonomi suatu negara terjadi jika hasil nyata dari penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan aktivitas ekonomi dalam jangka waktu tertentu dengan penilaian perbandingan antara pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk kondisi perekonomian yang lebih baik.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Amalia (2022:215) beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

a. Sumber Daya Manusia

Modal manusia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, diperhitungkan di suatu negara untuk mencapai hal ini. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat keahlian, pengetahuan, orisinalitas, dan kreativitas yang dimilikinya, serta tingkat pendidikan dan pelatihannya. Suatu negara akan memiliki kualitas tertinggi jika tenaga kerjanya sangat terampil dan terlatih. Pertumbuhan ekonomi akan terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang terampil, sedangkan kelimpahan sumber daya manusia akan berdampak kecil. Tenaga kerja suatu negara harus memadai untuk memenuhi permintaan keterampilan dan kemampuan saat ini untuk menumbuhkan ekonominya.

b. Sumber Daya Alam

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alamnya. Ini termasuk tanah dan dasar laut, serta sumber daya yang ditemukan di alam. Sumber daya alam suatu negara selaras dengan iklim dan lingkungannya. Dengan kata lain, negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah lebih mungkin untuk tumbuh daripada negara-negara dengan sumber daya yang terbatas.

c. Pembentukan Modal

Bangunan, mesin, dan transportasi adalah contoh aset modal yang berkontribusi pada pembentukan modal dalam perekonomian. Produksi semua barang buatan manusia adalah proses pembentukan modal. Pembentukan modal dapat meningkatkan ketersediaan modal dalam angkatan kerja dan dapat meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja dalam suatu angkatan kerja tertentu. Karena itu, berpotensi untuk meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

d. Pengembangan Teknologi

Dengan sumber daya yang terbatas, kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas. Karena penggunaan teknologi, negara-negara yang telah berkembang pesat dapat mengungguli negara-negara yang belum. Membuat keputusan pengembangan teknologi yang tepat dapat berdampak signifikan pada perkembangan ekonomi.

e. Faktor Sosial dan Politik

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh faktor budaya seperti adat istiadat, tradisi, nilai, dan kepercayaan yang unik di setiap negara. Iklim politik suatu negara berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Memiliki lingkungan politik yang stabil sangat penting bagi kemampuan suatu negara untuk berjalan dengan lancar, membuat warganya bahagia, dan meningkatkan *outputnya*. Dengan kata lain, dalam masyarakat yang bebas, orang lebih mungkin mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka sendiri.

Menurut Hanum et al (2022) Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran Pemerintah mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sementara tenaga kerja tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Ajijah et al (2023) Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Di sisi lain Menurut Hamzah (2021) Selain tingkat pengangguran, Inflasi dan suku bunga juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

2.1.3.3 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Sjafrizal (2017:156) Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu. Karena itu pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai PDRB pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Untuk menghindarkan kenaikan harga dalam perhitungan, maka data yang digunakan sebaiknya adalah PDRB dengan harga dasar konstan dan bukan dengan harga berlaku.

Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi yang paling utama dalam ilmu ekonomi adalah dengan menggunakan ukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi. Perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi didasarkan pada perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) dari satu periode ke periode berikutnya dimana PDRB merupakan ukuran nilai tambah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah (Ariani & Hasymi, 2018).

Menurut Sjafrizal (2017:156) Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dalam bentuk perkiraan laju pertumbuhan ekonomi tahunan atau untuk periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$LPE = \frac{(PDRB_n - PDRB_{n-1})}{PDRB_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_n$ = Tahun yang dihitung

$PDRB_{n-1}$ = Tahun Sebelumnya

Laju Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan seberapa cepat nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah meningkat dalam periode tertentu. Dimana Rasio PDRB ini dapat menunjukan tingkat kesejahteraan, produktivitas dan kemajuan suatu negara. Semakin tinggi Rasio PDRB, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Selain formula perhitungan diatas, terdapat formula lain untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengukur nilai barang atau jasa yang dimanfaatkan dalam satu periode ke periode berikutnya (Humairoh, 2023).

Berikut formula perhitungannya :

$$PDB = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

PDB = Produk Domestik Bruto

C = Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi

G = Konsumsi Pemerintahan

X = Ekspor

M = Impor

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan peraturan UU No.23 Tahun 2014, Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam berdasarkan prinsip desentralisasi.

Menurut Halim (2014:232) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri baik dalam aktivitas kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat di daerah tersebut yang didapat dari penerimaan yang berasal dari masyarakat terutama komponen pajak daerah dan retribusi daerah untuk memenuhi sumber pendapatan yang diperlukan pemerintah daerah.

Menurut Akhmad et al., (2020) Kemandirian Keuangan Daerah merupakan potensi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dana kegiatan pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada Masyarakat yang

berkontribusi melalui pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian Keuangan daerah adalah proporsi sumber dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan provinsi dibandingkan dengan sumber dana lainnya dalam membiayai kegiatan daerah (Mahardika & Fauzan, 2022). Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan (Indi et al., 2023:10)

Menurut Rachmawati (2024) Kemandirian Keuangan daerah merupakan potensi pemerintah daerah untuk membiayai dan mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya secara mandiri, berdasarkan prinsip desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah dapat ditentukan dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah sumber lain, seperti bantuan atau pinjaman dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi semakin rendah. Kemandirian Keuangan Daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan suatu daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, membiayai dan memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri seperti aktivitas pemerintahan, pembangunan, pelayanan maupun keuangan secara mandiri dengan

mengoptimalkan potensi yang ada pada daerah tersebut tanpa adanya bantuan atau pinjaman dari pemerintah pusat.

2.1.4.2 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian berfungsi sebagai alat pengukur untuk menilai sejauh mana kapabilitas pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan pencapaian keberhasilan yang telah diperoleh dalam satu periode, secara mandiri dan tidak tergantung pada dukungan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Tanudy & Parera, 2023).

Menurut Kawatu (2019:99) Pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

$$\text{Rasio KKD} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Dani (2022) Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Derajat desentrasisasi fiskal ini diukur dengan menggunakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut diperoleh formula untuk pengukuran kemandirian keuangan daerah yaitu:

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.2 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan, antara lain:

1. Cindi Oktavia dan Nur Handayani (2021) dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Tax effort*, Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan *Tax Effort* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Andini Nur Oktavianti, Hana Sri Mulyani, Yogi Ginanjar, Agustine Sulviani dan Dadang Suhendar (2023) dengan judul “ *The Effect of Local Own Source Revenue, Tax effort, and Capital Expenditure on The Level of Regional Financial Independence(Study on District/City Government in West Java ProvincePeriod 2019-2021)*”. The results of this study show that the principal income of the regions influences the level of financial independence of the regions. The *Tax effort* did not affect the financial independence of the regions. Capital expenditure has an impact on the region's level of financial independence. Region's own revenue, *Tax*

Effort, and capital expenditures have a concurrent (together) impact on a region's degree of financial independence.

3. Elisabeth Erniyati Wuwur, Norman Duma Sitinjak dan Diyah Sukanty Cahyaningsih (2024) dengan judul “ Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah : Belanja Modal dan Efektivitas PAD”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan efektivitas PAD memiliki pengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal dan efektivitas PAD memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Riza & Zuripal (2023) dengan judul “ Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pad Dan *Tax effort* Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketergantungan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah, Efektifitas PAD tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian daerah, *Tax effort* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah , Efektifitas PAD dan *Tax effort* secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.
5. Ulfirah Mutmainnah Ashary, Firman Menne, Thamrin Abduh (2023) dengan judul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan asli daerah terhadap Kemandirian keuangan daerah melalui UMKM di kabupaten kepulauan selayar ” Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap UMKM dan

kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap UMKM dan kemandirian keuangan daerah, UMKM tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.

6. Suherman, Faradilla Herlin, Rika Neldawaty, dan Rahmad Aldi Yanda (2023) dengan judul “ Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi” Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah atau pertumbuhan ekonomi.
7. Mutiara Bunda (2024) dengan judul “ Pengaruh Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Kemandirian Keuangan di Sumatera Barat ”. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya pajak daerah, pertumbuhan ekonomi dan investasi secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
8. Khoirunnisa, M., & Sofilda, E. (2023) dengan judul “ Determinasi Kemandirian Daerah di Sumatera Utara”. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Aset Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Transfer Ke Daerah, PDRB, dan Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.

9. Totoh Abdulfattah & Sri Mulyani (2024) dengan judul “Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Per Kapita, Investasi dan Belanja Modal berpengaruh secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. PDRB Per Kapita berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Investasi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
10. Resti Puspita Laoli, Febri Valentinus Situmorang, Benny Rojeston Marnaek Nainggolan (2020) dengan judul “ *The Effect of Economic Growth and Local Own Income on the Level of Regional Financial Independence (A Case Study in a Regency / City in North Sumatra)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Sumatera Utara periode 2014-2016.
11. Arib Muhammad Mihraj (2024) dengan judul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar” Hasil penelitian ini menunjukkan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, selanjutnya Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota

Makassar, Adapun variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Makassar.

12. Iis Solihat & Tona Aurora Lubis (2025) dengan judul “ Analisis Flypaper Effect, Fiscal Stress dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja keuangan daerah dengan *Tax effort* sebagai Variabel Moderasi pada provinsi-provinsi di pulau sumatera ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Flypaper effect berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Provinsi-provinsi di Sumatera, 2) Fiscal stress tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Provinsi provinsi di Sumatera,3) Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Provinsi-provinsi di Sumatera, 4) Flypaper effect berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh *Tax effort* pada Provinsi-provinsi di Sumatera,5) Fiscal stress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh *tax effort* pada Provinsi-provinsi di Sumatera, 6) Karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh *Tax effort* pada Provinsi-provinsi di Sumatera.
13. Achla Nur Shoba dan Fidiana (2022) dengan judul “Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian

keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

14. Tri Utari Handayanti dan Erinos (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi tidak dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan.
15. Praisy Gratia Sulangi, Choirul Anwar dan I Gusti Ketur Agung Uluput (2022) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Luas Wilayah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh Terhadap kemandirian Keuangan Daerah. Pertumbuhan ekonomi dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
16. Syafira Frijunita, Etty Gurendrawati, Tri Hesti Utaminingsyas (2024) dengan judul “ Pengaruh Pendapatan asli daerah, *Tax effort*, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan” . Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Upaya pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa PAD, *Tax effort*, dan belanja modal dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kemandirian keuangan daerah.

17. Aditia Warman dan Fefri Indra Arza (2024) dengan judul “ Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. The study's findings indicate that regional financial independence is adversely affected by the magnitude of the local government and capital expenditures. Concurrently, regional financial autonomy is fostered by economic expansion.
18. Idarni Harefa & Ardi Paminto (2022) dengan judul “ Pengaruh belanja daerah dan dana alokasi umum terhadap *Tax effort* dan tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota provinsi sumatera utara.” Hasil menunjukkan bahwa pengaruh Belanja daerah dalam hal ini belanja langsung berpengaruh positif terhadap *Tax effort* sedangkan Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap *Tax effort* pada pemerintah kabupaten/kota provinsi sumatera utara, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax effort*, Belanja Langsung berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Sedangkan Belanja Tidak Langsung berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian Keuangan di Sulawesi Utara.

19. Noor Fikri Muhammad (2021) dengan judul “ Pengaruh Dana Perimbangan, PDRB Per Kapita, *Tax effort* dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kaus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2011-2017) ”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan, PDRB Per Kapita, dan Upaya Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2017. Sedangkan Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2011-2017.
20. Tessa Lonica Karouw, Daisy S.M. Engka, Krest D Tolosang (2022) dengan judul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah di Kota Manado.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Cindi Oktavia dan Nur Handayani (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, <i>Tax effort</i> , Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Tax effort</i> (Upaya Pajak) Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur (2017-2019) Menggunakan SPSS	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan <i>Tax Effort</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 10, Nomor 3, Maret 2021 e-ISSN: 2460-0585
2	Andini Nur Oktavianti, Hana Sri Mulyani, Yogi Ginanjar, Agustine Sulviani dan Dadang Suhendar (2023). <i>The Effect of Local Own Source Revenue, Tax effort, and Capital Expenditure on The Level of Regional Financial Independence</i> (Study on District/City Government in West Java	<i>Tax effort</i> <i>The Level Of Regional Financial Independence</i>	<i>Local Own Source Revenue</i> <i>Capital Expenditure</i> <i>Conducted with the help of SPSS 21 software</i>	<i>The principal income of the regions influences the level of financial independence of the regions. The Tax effort did not affect the financial independence of the regions. Capital expenditure has an impact on the region's level of financial independence. Region's own revenue, Tax Effort, and capital expenditures have a concurrent (together) impact on a region's degree of financial independence.</i>	Finance and Business Management Journal Vol. 1. No. 1, 2023

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
<i>Province Period 2019-2021)</i>					
3	Elisabeth Erniyati Wuwur, Norman Duma Sitinjak dan Diyah Sukanty Cahyaningsih (2024) Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah : Belanja Modal dan Efektivitas PAD.	Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Independent) Kemandirian Keuangan Daerah (Variabel Dependen)	Belanja Modal Efektivitas PAD Menggunakan Analisis SPSS	<i>The result show that capital expenditure and PAD effectiveness have a direct influence on regional finansial independece has a direct influence on economic growth, while capital expenditure and PAD effectiveness have an indirect on economic growth.</i>	Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Humaniora Vol. 4, No. 1 (2024) ISSN : 2598-4934
4	Riza & Zuripal (2023). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pad Dan <i>Tax effort</i> Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi	<i>Tax effort</i> Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat Ketergantungan Daerah Efektifitas PAD	(a)Ketergantungan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah (b)Efektifitas PAD tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian daerah (c) <i>Tax effort</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah (d)Ketergantungan Daerah , Efektifitas PAD dan <i>Tax effort</i> secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891 Volume 9 (5) Oktober Tahun 2023.
5	Ulfirah Mutmainnah Ashary, Firman Menne, Thamrin Abduh (2023). Pengaruh Pertumbuhan	Kemandirian Keuangan Daerah Pertumbuhan Ekonomi	UMKM Pendapatan Asli Daerah	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap UMKM dan kemandirian	<i>Indonesian Journal of Business and Managemet</i> , 6(1), 104-110.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Ekonomi dan Pendapatan asli daerah terhadap Kemandirian keuangan daerah melalui UMKM di kabupaten kepulauan selayar.			keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap UMKM dan kemandirian keuangan daerah, UMKM tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan	
6	Suherman, Faradilla Herlin, Rika Neldawaty, dan Rahmad Aldi Yanda (2023) Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi.	Pertumbuhan Ekonomi Kemandirian Keuangan Daerah	Belanja Daerah	Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah atau pertumbuhan ekonomi.	<i>Iltizam Journal Of Shariah Economic Research</i> Vol. 7, No. 2 (2023) E-ISSN:2598 2540
7	Mutiara Bunda (2024) Pengaruh Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Kemandirian Keuangan di Sumatera Barat	Pertumbuhan Ekonomi Kemandirian Keuangan Daerah	Pajak Daerah Investasi	Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya pajak daerah, pertumbuhan ekonomi dan investasi secara	<i>Doctoral dissertatio n, Universita s Andalas</i>

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
8	Khoirunnisa, M., & Sofilda, E. (2023) Determinasi Kemandirian Daerah di Sumatera Utara.	Pertumbuhan Ekonomi Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan asli daerah Aset pemerintah daerah Transfer ke daerah PDRB Utang pemerintah	Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Aset Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Transfer Ke Daerah, PDRB, dan Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah.	<i>Jurnal Ekonomi Trisakti</i> , 3(2), 3823-3832.
9	Totoh Abdulfattah & Sri Mulyani (2024) Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023	Kemandirian Keuangan Daerah	Pdrb Per Kapita Investasi Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Per Kapita, Investasi dan Belanja Modal berpengaruh secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Dearah. PDRB Per Kapita berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Investasi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Belanja modal berpengaruh	<i>Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis</i> , 2(2), 694-701.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
10	Resti Puspita Laoli, Febri Valentinus Situmorang, Benny Rojeston Marnaek Nainggolan (2020). The Effect of Economic Growth and Local Own Income on the Level of Regional Financial Independence (A Case Study in a Regency / City in North Sumatra	<i>Economic Growth</i> <i>Regional Finansial Independence</i>	<i>Local Own Income</i> Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatra Utara Menggunakan Analisis SPSS	the Economic Growth variable partially has no and insignificant effect on Financial Independence which is registered in the North Sumatra Central Statistics Agency for the period 2014-2016 with a significant value of 0.390, Regional Original Income partially has a positive and significant effect on Financial Independence listed in North Sumatra	JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 3, 2020. P-ISSN: 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306
11	Arib Muhammad Mihraj (2024) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar	Kemandirian Keuangan Daerah	PDRB Belanja Modal Jumlah Penduduk	Hasil penelitian ini menunjukkan Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi.	<i>Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin</i>
12	Iis Solihat & Tona Aurora Lubis (2025) dengan judul “ Analisis Flypaper Effect, Fiscal Stress dan Karakteristik Pemerintah Daerah	Kinerja Keuangan Daerah	Fiscal Stress Karakteristik Pemerintah Daerah <i>Tax effort</i> (Moderasi)	pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap	<i>Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan</i> , 13(05), 1609–1622.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Terhadap Kinerja keuangan daerah dengan <i>Tax effort</i> sebagai Variabel Moderasi pada provinsi-provinsi di pulau sumatera.			kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.	
13	Achla Nurus Shoba dan Fidiana (2022). KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, PERTUMBUHAN EKONOMI	Kemandirian Keuangan Daerah Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2018-2020. Menggunakan Analisis SPSS	pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 5, Mei 2022. e-ISSN: 2460-0585
14	Tri Utari Handayani dan Erinos(2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating	Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Moderating) Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah Upaya Pajak Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 2, No. 1, Seri C, Februari 2020, Hal 2348-2361 ISSN: 2656-3649 (Online).
15	Praisyy Gratia Sulangi, Choirul	Pertumbuhan Ekonomi	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum berpengaruh	Jurnal Akuntansi,

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Anwar dan I Gusti Ketur Agung Uluput (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Luas Wilayah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia	Kemandirian Keuangan Daerah	Luas Wilayah Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Terhadap kemandirian Keuangan Daerah. Pertumbuhan ekonomi dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Perpajakan dan Auditing, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022. e-ISSN: 2722-9823
16	Syafira Frijunita, Etty Gurendrawati, Tri Hesti Utaminingtyas (2024) Pengaruh Pendapatan asli daerah, <i>Tax effort</i> , dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	<i>Tax effort</i> Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah Belanja modal	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Upaya pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa PAD, <i>Tax effort</i> , dan belanja modal dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kemandirian keuangan daerah.	<i>Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing</i> , 5 (2), 256-269.
17	Aditia Warman dan Fefri Indra Arza (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi Kemandirian Keuangan Daerah	Ukuran Pemerintah Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat (2017-2021)	regional financial independence is adversely affected by the magnitude of the local government and capital expenditures. Concurrently,	Jurnal Nuansa Karya Akuntansi Vol. 2, No 2, Agustus 2024. e-ISSN: 2988-2702

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	terhadap Kemandirian Keuangan Daerah			regional financial autonomy is fostered by economic expansion.	
18	Idarni Harefa & Ardi Paminto (2022) Pengaruh belanja daerah dan dana alokasi umum terhadap <i>Tax effort</i> dan tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota provinsi sumatera utara.	<i>Tax effort</i> Kemandirian Keuangan Daerah	Belanja Daerah Dana Alokasi Umum	Hasil menunjukkan bahwa pengaruh Belanja daerah dalam hal ini belanja langsung berpengaruh positif terhadap <i>Tax effort</i> sedangkan Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap <i>Tax effort</i> pada pemerintah kabupaten/kota provinsi sumatera utara, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Tax effort</i> , Belanja Langsung berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Sedangkan Belanja Tidak Langsung berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarm an (JIEM)</i> , 7(4).

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian Keuangan di Sulawesi Utara.	
19	Noor Fikri Muhammad (2021). PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PDRB PER KAPITA, <i>TAX EFFORT</i> , DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2017	<i>Tax effort</i>	Dana Perimbangan PDRB Per Kapita Jumlah Penduduk Pendapatan Asli Daerah	The variable Balance Funds, Per Capita GRDP, and <i>Tax effort</i> . has a positive and significant influence on Local Revenue in the province of Central Java in the period 2011-2017. While the Population has no influence on Local Revenue in the province of Central Java in the period 2011-2017.	Diponegoro Journal of Economics Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021. ISSN : 2337-3814
20	Tessa Lonica Karouw, Daisy S.M. Engka, Krest D Tolosang (2022).	Pertumbuhan Ekonomi Kemandirian Keuangan Daerah	Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Manado		Analisis Regresi Berganda	tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah di Kota Manado.	Vol. 22 No. 4 Mei 2022
Seftia Azhari (2025)					
Pengaruh Upaya Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023)					

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep otonomi daerah erat kaitannya dengan desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah federal kepada masing-masing daerah. Hal ini meliputi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan perekonomian, dan penyusunan rencana pembangunan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing (Kartika et al, 2023).

Otonomi daerah erat kaitannya dengan desentralisasi fiskal. Lebih khusus lagi jika membicarakan tentang pajak daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan

daerah merupakan suatu keharusan yang tidak terelakkan lagi untuk menaikkan penerimaan pajak pusat dan daerah. desentralisasi mengacu pada penyerahan kegiatan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sesuai prinsip otonomi. Konsisten dengan desentralisasi, sisi pembiayaan juga telah didesentralisasi. Artinya daerah harus mampu membiayai sendiri biaya pembangunannya. Oleh karena itu, desentralisasi tugas pemerintahan daerah otonom harus dibarengi dengan desentralisasi keuangan. Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan fiskal daerah adalah desentralisasi fiskal. Singkatnya, desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kekuasaan urusan perpajakan atau penerimaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengawasi keuangan daerah, termasuk pemungutan pajak (Fahrizal & Bintoro, 2022).

Menurut Novindriastuti & Purnomowati (2020) Penguatan desentralisasi fiskal seharusnya mendorong pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan semaksimal mungkin secara sendiri. Jika pengelolaan keuangan pemerintah daerah berhasil secara sendiri dan baik, maka pemerintah daerah tersebut dikatakan telah mandiri.

Kemandirian keuangan daerah merujuk pada kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Novianti & Ishak, 2022). Menurut Ambya (193:2023)

Desentralisasi Fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak. Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan melayani berbagai pengeluaran publik.

Menurut Muhammad (2021) Dalam mencari penerimaan daerah untuk pendapatan asli daerah salah satunya dapat dilihat dari kondisi daya pajaknya. Daya pajak merupakan aspek relevan bila dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kemandirian daerah. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi daya pajak suatu daerah maka pendapatan daerah tersebut juga akan semakin tinggi.

Menurut Kristiaji et al (2021) *Tax effort* dapat digunakan untuk menganalisis posisi fiskal suatu daerah yaitu dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap kapasitas pajak. Suatu wilayah dianggap memiliki *Tax effort* yang tinggi jika nilai rasionya lebih besar dari 1. Hal ini menyiratkan wilayah tersebut dapat memanfaatkan atau menggali seluruh basis pajaknya untuk meningkatkan penerimaan. Di sisi lain, nilai rasio *Tax effort* yang kurang dari 1 mengindikasikan masih terdapat potensi untuk digali sebagai penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Tax effort merupakan salah satu wujud dari bagaimana kemampuan suatu daerah dalam memungut dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya, upaya pajak di suatu daerah seringkali dilihat berdasarkan penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada periode tertentu (Amoh, 2019).

Oleh karena itu dalam penelitian ini Upaya Pajak diukur dengan menggunakan rasio perbandingan antara Realisasi penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikali 100% .

Tax effort merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya agar tidak bergantung pada dana transfer (Oktavia & Handayani, 2021). Meningkatnya pendapatan asli daerah disebabkan oleh upaya pajak dimana pajak daerah merupakan sumber utama dan terbesar dari pendapatan asli daerah (Muhammad, 2021). Handraini et.al (2024) Dengan meningkatkan Pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak hanya dapat membiayai program-program pembangunan dan lebih mandiri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

Berdasarkan uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riza & Zuripal (2023) yang menunjukkan bahwa *Tax effort* atau Upaya Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah, dan penelitian yang dilakukan Setiawan (2024) mengemukakan bahwa *Tax effort* atau upaya pajak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain upaya pajak faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu. Karena itu pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai PDRB pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Untuk

menghindarkan kenaikan harga dalam perhitungan, maka data yang digunakan sebaiknya adalah PDRB dengan harga dasar konstan dan bukan dengan harga berlaku (Sjafrizal, 2017:156).

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dan menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat selama periode waktu tertentu (Heryanti et al., 2019). Besar kecilnya kemandirian finansial suatu daerah bergantung pada laju pertumbuhan ekonominya. Tingkat kemandirian finansial suatu wilayah tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan pertumbuhan ekonominya (Arifah, 2025).

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi ini diperoleh dengan mengurangi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sekarang dengan PDRB tahun sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan PDRB tahun sebelumnya dan dikalikan dengan seratus persen.

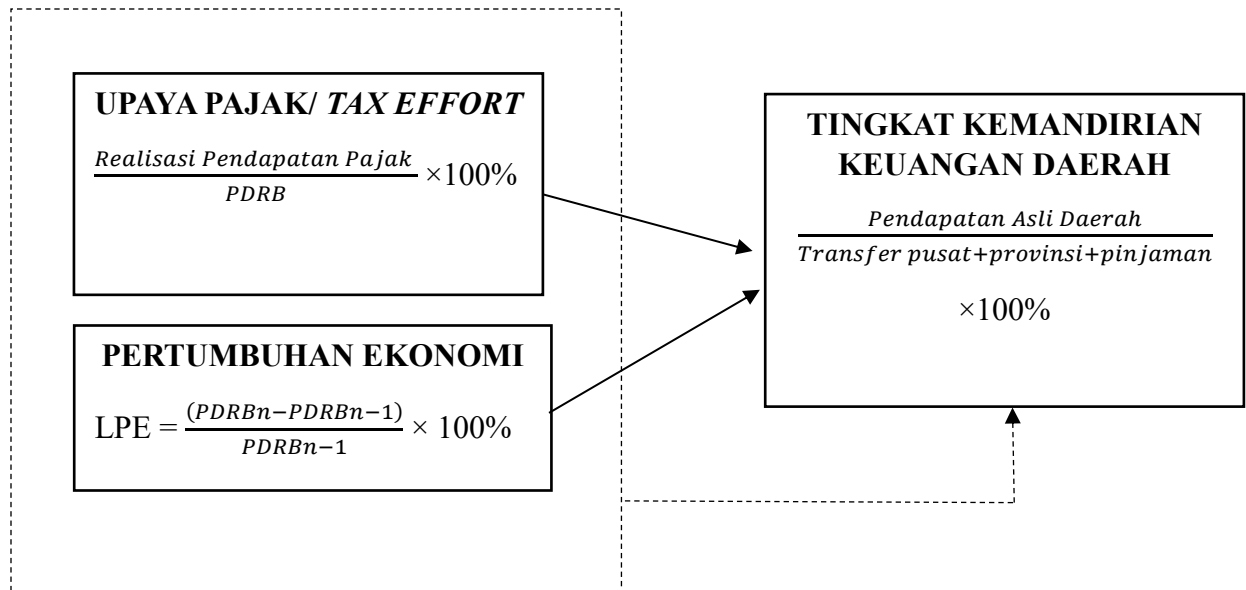
Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Alfiansyah (2024) mengatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Achla Nurus Shoba dan Fidiana (2022) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori keagenan. Teori Keagenan dicetuskan oleh Jensen dan Meckeling (1976) yang menyatakan bahwa hubungan

terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Purba, 2023).

Teori ini mengacu pada hubungan antara dua belah pihak, yaitu prinsipal sebagai pemberi kewenangan dan agen sebagai penerima kewenangan tersebut. Dalam konteks pemerintahan, prinsipal diperankan oleh pemerintah pusat sebagai pemberi wewenang, sedangkan agen diperankan pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas dan wewenang yang diberikan. Agen di harapkan dapat memberikan keuntungan kepada prinsipal dalam pengambilan keputusan keuangan. Prinsipal memiliki kekuasaan untuk memberikan dana transfer pusat sebagai sumber daya kepada agen. Agen diharapkan mampu melaksanakan tugas ataupun wewenang dari pemerintah pusat dengan maksimal untuk mencapai tujuan yaitu kemandirian keuangan daerah (Puspita & Budiitjaksono, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digambarkan kerangka penelitian yang dianggap perlu dilakukan terkait pengujian. Adapun kerangka pemikiran dan indikator dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 2.1.



Keterangan :

—————▶ : Secara Parsial

-----▶ : Secara Simultan

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

1. Diduga Upaya Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023;

2. Diduga Upaya Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023;
3. Diduga Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023